



RENCANA KERJA TAHUN 2024

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI MALUKU**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2022	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	31
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku	17
Tabel 2.3	Perbandingan Antara Rancangan Awal RKPD dan Hasil Kebutuhan Renstra	28
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku	34
Tabel 3.2	Strategi dan Arah Kebijakan	35
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku	37

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2024, merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun setiap tahun. Rencana Kerja (Renja) Dinas memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya Renja ini dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Ambon, Maret 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Maluku


Endang Diponegoro, SP., MM
NIP. 19630929 198902 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggung jawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Maluku melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku menyusun Dokumen Renja Tahun 2024.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dapat berperan secara optimal, sehingga dapat membantu dalam mengurangi angka pengangguran dan masalah ketenagakerjaan serta permasalahan ketransmigrasian di Provinsi Maluku.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Pemutakhiran dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 -2025;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 01 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
- i. Peraturan Gubernur Maluku Nomor: 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Maluku.
- j. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 21 Tahun 2017 tentang Uraian tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Maluku adalah:

- a. Memberikan arah, pedoman dan landasan bagi jajaran dinas dalam melaksanakan prioritas - prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- d. Memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Maluku dalam satu tahun kedepan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- e. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinas atas kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Kinerja.

1.3.2 Tujuan

- a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku;
- b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2024 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku

Pada akhir pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2022 dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya yang tertuang dalam program dan kegiatan.

Keberhasilan program dan kegiatan dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangannya. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan anggaran (APBD). Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik 8 Program dan 33 Kegiatan dengan tingkat capaian kinerja dan realisasi APBD sangat baik yaitu mencapai 96,59%. Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output. Input terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019 seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023					
					Target Renja OPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)				
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10=(5+7+9)	(11)=(10)/(4)				
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI														
Belanja Operasional														
01	1													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi												
2	01	1	01											
Keg. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
2	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Tersedianya Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023					
					Target Renja OPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)				
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10=(5+7+9)	(11)=(10)/(4)				
	01	1	02		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	108 Org/Bulan	97 Org/Bulan	97 Org/Bulan	108 Org/Bulan		108 Org/Bulan	108 Org/Bulan	100%
2	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	01	1	02	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2	01	1	04		Keg. Administrasi Barang Milik daerah Pada perangkat daerah									
2	01	1	04	02	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	01	1	05		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023					
					Target Renja OPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)				
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10=(5+7+9)	(11)=(10)/(4)				
2	01	1	05	03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	-	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	01	1	05	04	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	15 Orang	9 Orang	3 Orang	3 orang	100%	15 Orang	15 Orang	100%
2	01	1	05	06	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	135 Orang	45 Orang	45 Orang	100%	-	-	100%
2	01	1	06		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	3 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	01	1	06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetakan Bahan Penggandaan	1 Paket	3 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10=(5+7+9)	(11)=(10)/(4)
2 01 1 06 05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	100%
2 01 1 06 06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2 01 1 06 07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	55 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	25 Laporan	25 Laporan	100%
2 01 1 06 08	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 01 1 07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah									
2 01 1 07 10	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	10 Unit	24 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
2 01 1 07 09	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	10 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
2 01 1 07 11	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023					
					Target Renja OPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)				
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10=(5+7+9)	(11)=(10)/(4)				
2	01	1	07	12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	36 Unit	32 Unit	32 Unit	100%	12 Unit	12 Unit	100%
2	01	1	08		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	100%
2	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	100%
2	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	01	1	09		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	1 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023					
					Target Renja OPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)				
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10=(5+7+9)	(11)=(10)/(4)				
2	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	15 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
2	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	45	23 Unit	23 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%
2	01	1	09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)														
					Penyusunan Tenaga Kerja Makro	Tersusunya Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	100%
					Penyusunan Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	50 Orang	-	19 Orang	19 Orang	100%	-	-	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja OPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10=(5+7+9)	(11)=(10)/(4)
	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	-	181 Perusahaan	181 Perusahaan	100%	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100%
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) daerah Provinsi									
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat, berdampak, pada kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat, berdampak, pada kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	20 Perkara	-	27 Perkara	27 Perkara	100%	-	-	100%
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat, berdampak, pada kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat, berdampak, pada kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	50 Perkara	-	45 Perkara	33 Perkara		50 Perkara	50 Perkara	100%
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	3 Lembaga	3 Lembaga	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023			
					Target Renja OPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10=(5+7+9)	(11)=(10)/(4)		
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK).									
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Ditetapkan Upah Minimum Provinsi	1 SK	3 SK	1 SK	1 SK	100%	1 SK	1 SK	100%
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100 Orang	-	48.457 Orang	80.268 Orang		100 Orang	100 Orang	100%
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN									
			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan									
			Pengawasan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan Norma Kerja di Perusahaan	2500 Perusahaan	-	2240 Perusahaan	1345 Perusahaan	-	2500 Perusahaan	2500 Perusahaan	100%
			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	10 Kasus	-	4 Kasus	4 Kasus	100%	10 Kasus	10 Kasus	100%
			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	2500 Perusahaan	-	-	-	-	2500 Perusahaan	2500 Perusahaan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023			
					Target Renja OPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10=(5+7+9)	(11)=(10)/(4)		
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI									
			Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	100%	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI									
			Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Pemantapan									
			Penguatan SDM Dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah peralatan Pertanian yang diberikan kepada Transmigran untuk penguatan SDM	-	6 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	100%	15 kelompok	15 kelompok	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-indikator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Maluku menetapkan indikator kinerja periode 2019-2024 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai *dengan* tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Permasalahan umum yang dihadapi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan kasus perselisihan hubungan industrial dikabupaten/kota belum optimal akibat terbatasnya Pegawai Mediator Hubungan Industrial
2. Penerapan Upah Minimum diperusahaan sebagaimana keputusan Gubernur belum optimal, terutama perusahaan-perusahaan kecil yang beroperasi di Maluku, yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan pekerja
3. Belum tersedianya lembaga sertifikasi tenaga kerja di daerah untuk memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja
4. Pengembangan permukiman transmigrasi baru (PTB) belum terlaksana karena terkendala aspek clean and clear (2C)

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan tenaga kerja yang bersertifikat dan berbasis kompetensi.			53,23	48,33	36,71	27,66	0	0	36,71	27,66	
2	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan			32	0	40	60	32	0	40	60	
3	Jumlah Lembaga Latihan Terakreditasi.			8	8	8	8	8	5	8	8	
4	Jumlah <i>Skill Development Center</i>			0	0	1	0	0	0	1	0	
5	Jumlah lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 2 (LSP-2) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK)			0	0	1	1	0	0	1	1	
6	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat			0	250	250	250	0	0	250	250	
7	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan.			2,83	2,83	2,83	3	32,77	8,76	2,83	3	
8	Jumlah penanganan penganggur dan setengah penganggur melalui system padat karya.			160	180	200	250	160	0	200	250	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Jumlah penyelenggaraan Pameran Pasar Kerja (Maluku Job Fair)			0	0	1	1	0	0	1	1	
10	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).			61,1	62,15	64,32	66,5	104,44	57,5	64,32	66,5	
11	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Aktif.			58.802	60.000	70.000	80.000	58.802	50,812	70.000	80.000	
12	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan			200	228	250	275	135	38	250	275	
13	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama didaftarkan.			70	107	115	125	70	4	115	125	
14	Jumlah Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan			61	10	10	10	61	61	10	10	
15	Jumlah Upah Minimum			2.222.220	2.400.664	2.593.438	2.801.691	2.222.220	2.400.664	2.593.438	2.801.691	
16	Jumlah Perusahaan yang Menjadi Peserta BPJS.			6.456	6.519	6.642	6.765	6.519	7.789	6.642	6.765	
17	Besaran Pemeriksaan Perusahaan.			22,39	22,41	33,84	39,28	30,08	17,11	33,84	39,28	
18	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan.			0,70	1,74	2,35	2,96	12,56	16,28	2,35	2,96	
19	Jumlah Kepatuhan wajib lapor ketenagakerjaan diPerusahaan secara berkala.			1.820	2.055	3.324	4.593	7.134	2.348	3.324	4.593	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Jumlah Kecelakaan Kerja.			3	3	3	2	3	5	3	2	
21	Jumlah Penerapan SMK3 diPerusahaan.			0,04	0,056	0,056	0,064	2,00	1,42	0,056	0,064	
22	Jumlah pengusaha yang memahami ketentuan Hiperkes dan kesehatan kerja			0	0	50	100	0	0	50	100	
23	Cakupan perusahaan yang mendapat pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan tenagakerja			0,70	1,74	2,35	2,96	0,70	1,74	2,35	2,96	
24	Jumlah tenaga kerja yang memahami penanganan tanggap darurat/emergency respon planning			90	90	90	120	90	90	90	120	
25	Cakupan kawasan transmigrasi yang dibangun dan difasilitasi pelayanan sosial budaya			2	2	3	3	0	0	3	3	
26	Persentase dokumen identifikasi potensi Kawasan Transmigrasi yang dapat diimplementasikan.			0	0	100	100	0	0	100	100	
27	Persentase dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang dapat diimplementasikan.			0	0	100	100	0	0	100	100	
28	Persentase dokumen rencana satuan Kawasan Transmigrasi yang dapat diimplementasikan.			0	0	100	100	0	0	100	100	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Persentase dokumen Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) Transmigrasi yang dapat diimplementasikan.			0	0	100	100	0	0	100	100	
30	Persentase dokumen Rencana Pemugaran Desa yang dapat diimplementasikan.			0	0	100	100	0	0	100	100	
31	Jumlah Satuan Pemukiman yang dibangun dan layak huni			0	0	1	1	0	0	1	1	
32	Jumlah Desa Kawasan Transmigrasi yang dipugar			0	0	1	1	0	0	1	1	
33	Jumlah Penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi			0	0	2	2	0	0	2	2	
34	Cakupan masyarakat transmigrasi lokal dan regional yang diberdayakan			9	0	9	15	0	5	9	15	
35	Persentase kewirausahaan diPermukiman/Kawasan Transmigrasi.			28,28	30	35	40	28,28	0	35	40	
36	Persentase pembinaan di Permukiman transmigrasi Untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran lokal .			90	91,67	93,33	95	93,33	95	93,33	95	
37	Persentase lembaga social budaya yang fungsional di Kawasan Transmigrasi.			40	50	60	70	111,11	0	60	70	
38	Jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensi.			10	10	10	10	6	6	10	10	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas dan tantangan berat dimasa depan. Sebagai institusi yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak pengurangan pengangguran perannya diharapkan menjadi optimal. Banyak tantangan yang dihadapi dan tuntutan yang harus dipenuhi.

Situasi perekonomian mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap bidang ketenagakerjaan melalui penciptaan lapangan kerjadan penurunan pengangguran. Perlu dilakukakan iklim investasi yang kondusif untuk bias membuka dan memperluas lapangan pekejaan.

Sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional tertentu (pengantar kerja, mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan) serta non structural/fungsional umum merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sekaligus sebagai salah satu factor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Namun disadari, bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan dan ditambah sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program pembangunan secara optimal.

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Namun, secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan kebijakan

dan program pembangunan tersebut belum dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku.

Peran dan fungsi Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja diharapkan lebih optimal lagi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan pekerja diperusahaan. Untuk meningkatkan akreditasi balai tersebut melalui implementasi ISO 9001.

Persoalan data sering kali menjadi kendala dalam merencanakan program, kegiatan dan kebijakan. Data belum tersaji secara sempurna, efektif dan melembaga. Kesulitan dalam mencari data yang akurat sampai tingkat Desa menjadi persoalan tersendiri.

Pada akhirnya pengangguran masih relative tinggi, apalagi kalau yang dibicarakan adalah kelompok setengah penganggur. Disini dapat diartikan bahwa banyak tenaga kerja yang bekerja tetapi tetap miskin karena produktivitasnya rendah atau penghasilannya kecil dan tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Berpijak dari hal tersebut diatas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan / hambatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- Urusan Wajib (Ketenagakerjaan)
 - 1) Terbatasnya lapangan kerja;
 - 2) Kualitas dan daya saing pencari kerja belum sesuai kebutuhan pasar;
 - 3) Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam menciptakan lapangan kerja baru sesuai potensi wilayah;
 - 4) Kurangnya data perencanaan dan informasi peluang kerja dalam dan luar negeri;
 - 5) Belum terbangunnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan (Terutama Pendidikan Tinggi dan Vokasi)
- Urusan Pilihan Ketransmigrasian
 - 1) Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi.

- 2) Kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam mempersiapkan transmigrasi baik di daerah asal maupun daerah tujuan transmigrasi.
- 3) Belum optimalnya kota terpadu mandiri transmigrasi.
- 4) Kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal disekitar kawasan transmigrasi.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan OPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam

Pelayanan kepada masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang
2. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan

• Penentuan Isu-isu Strategis

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum didalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dan pengangguran dalam strategi yang dimaksudkan tentu saja

memerlukan kerjasama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, salah satu cara untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran adalah dengan mencermati instansi yang ada, dan memberikan tekanan pada instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Guna menurunkan jumlah penduduk miskin serta pengurangan pengangguran, disusunlah strategi pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman maupun peluang (SWOT) dalam menjalankan strategi tersebut

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Maluku dari berbagai aspek dan berdasarkan Analisis SWOT, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Ketenagakerjaan Provinsi Maluku. Penentuan isu strategis menjadi

Bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Kerja satu tahun.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi sebagai berikut :

1. Tingginya angka pengangguran
2. Rendahnya kesempatan kerja dan kemampuan berusaha mandiri
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan Ketenagakerjaan.
4. Rendahnya kompetensi pencari kerja
5. Belum terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 2 (LSP-2) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) pekerja dan pencari kerja

6. Belum terbentuknya *Skill Development Center*
7. Belum optimalnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja
8. Tingginya resiko kehilangan pekerjaan dan kecelakaan kerja
9. Kurangnya peluang mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui program transmigrasi

2.3.3. Dampak terhadap Visi dan Misi Gubernur Maluku dan Terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yaitu *Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaula tatas Gugusan Kepulauan*.

Untuk itu visi yang dituangkan dalam misi Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku dilaksanakan dalam program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku bersinergi terhadap visi misi dan terhadap pencapaian visi nasional yaitu Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang merupakan bagian pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Sehubungan dengan hal tersebut kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang

ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja. Sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat memanfaatkan peluang kerja informal. Karena keterbatasan kemampuan pencari kerja yang pada umumnya berpendidikan SLTA kebawah, sehingga kesempatan kerja terbuka pada umumnya untuk jenis-jenis pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan ketrampilan khusus ternyata juga menimbulkan berbagai kasus mulai dari rendahnya kemampuan pekerja dalam bekerja, upah yang tidak memenuhi standar, permasalahan penyediaan jasa tenaga kerja (*outsourcing*) serta pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan/pengguna jasa yang dapat memicu terjadinya perselisihan hubungan industrial.

Selain kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran dan disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, disisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan job/jabatan yang dibutuhkan.

Melihat kenyataan tersebut masalah ketenagakerjaan khususnya penanganan pengangguran terbuka (*openunemployment*) merupakan masalah nasional yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting yaitu disamping sebagai penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran. Berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku pada kenyataannya memperoleh animodan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Namun demikian hal

tersebut bukanlah alasan untuk berpuas diri melainkan sebaliknya merupakan penambah semangat untuk terus berinovasi termasuk mengadopsi perkembangan serta kemajuan teknologi untuk meningkatkan kinerja khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2021 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel. 2.3. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidaksesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Tabel 2.3

PERBANDINGAN ANTARA RANCANGAN AWAL RKPD DAN HASIL KEBUTUHAN RENSTRA

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2022	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2022	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Provinsi			13.103.347.058	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Provinsi				13.103.347.058
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Provinsi			367.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Provinsi				367.500.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Provinsi			10.218.446.123	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Provinsi				10.218.446.123
3	Administrasi Barang Milik daerah Pada perangkat daerah	Dinas Provinsi			45.000.000	Administrasi Barang Milik daerah Pada perangkat daerah	Dinas Provinsi				45.000.000
4	Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	Dinas Provinsi			122.688.780	Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	Dinas Provinsi				122.688.780
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Provinsi			491.245.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Provinsi				491.245.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Provinsi			531.874.419	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Provinsi				531.874.419
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Provinsi			550.661.436	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Provinsi				550.661.436
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Provinsi			775.931.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Provinsi				775.931.300
II	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Provinsi			120.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Provinsi				Program dan Kegiatan Prioritas yang diusulkan
9	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Provinsi			120.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Provinsi				
III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Provinsi			1.000.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Provinsi				Program dan Kegiatan Prioritas yang diusulkan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2022	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2022	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Pelaksanaan Latihan Berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Provinsi			1.000.000.000	Pelaksanaan Latihan Berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Provinsi				
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Provinsi			100.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Provinsi				Program dan Kegiatan Prioritas yang diusulkan
11	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota	Dinas Provinsi			50.000.000	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota	Dinas Provinsi				
12	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Provinsi			50.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Provinsi				
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Provinsi			220.000.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Provinsi				Program dan Kegiatan Prioritas yang diusulkan
13	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran perjanjian Kerja Bersama Untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (Satu) Kab/Kota	Dinas Provinsi			20.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran perjanjian Kerja Bersama Untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (Satu) Kab/Kota	Dinas Provinsi				
14	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) daerah Provinsi	Dinas Provinsi			120.000.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) daerah Provinsi	Dinas Provinsi				
15	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)	Dinas Provinsi			80.000.000	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)	Dinas Provinsi				
VI	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Dinas Provinsi			197.000.000	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Dinas Provinsi				Program dan Kegiatan Prioritas yang diusulkan
16	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Provinsi			197.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Provinsi				

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2022	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2022	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Provinsi			150.000.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Provinsi				Program Pilihan yang di usulkan
17	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dinas Provinsi			150.000.000	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Dinas Provinsi				
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Provinsi			100.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Provinsi				Program Pilihan yang di usulkan
18	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman				100.000.000						

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda dan sasaran Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, Pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang, dan pembangunan wilayah demi terwujudnya Visi dan Misi pembangunan nasional.

Pembangunan Ketenagakerjaan dalam kerangka Agenda Pembangunan Nasional 2019–2024 dengan sasaran sebagai berikut:

a. Bidang Ketenagakerjaan:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter antara lain: Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: Pengelolaan sumber daya ekonomi
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
4. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

b. Bidang Ketransmigrasian

1. Pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
2. Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan;
3. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah

sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan pembangunan sektor perdagangan merupakan salah satu dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku sesuai dengan perubahan kearah perbaikan system pembinaan dengan mengacu kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku

Berpedoman pada visi Pembangunan Daerah Provinsi Maluku yaitu:

“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani ,Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan.”

Sebagaimana Visi Pembangunan Daerah Provinsi Maluku yang tersebut diatas, untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi

Misi pembangunan Provinsi Maluku yang sesuai dengan urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian adalah misi kesatu, ketiga, kelima dan keenam yakni :

“ Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani, Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata dan Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi ”

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima)

Tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Maluku tahun 2019-2024 maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sector ketenagakerjaan tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi pencari kerja
2. Mendorong terciptanya kesempatan kerja disektor formal maupun sector informal
3. Meningkatkan suasana kondusif dalam berinvestasi, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga kerja

Sedangkan sektor Ketransmigrasian yaitu:

1. Mendorong pengembangan wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru dikawasan transmigrasi.
2. Meningkatkan kualitas masyarakat dan permukiman dikawasan transmigrasi

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secaranyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur. Sasaran yang hendak dicapai dalam membangun sektor ketenaagakerjaan tahun 2024 yaitu:

1. Terserapnya pencari kerja di pasar kerja
2. Mengurangi pengangguran melalui penempatan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif
3. Tercapainya perlindungan dan kesejahteraan serta terpenuhinya hak tenaga kerja
4. Terciptanya kemandirian kawasan transmigrasi untuk menunjang ketahanan pangan dan pembangunan daerah
5. Terwujudnya kemandirian masyarakat dan kawasan transmigrasi

Tabel 3.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Maluku**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kompetensi pencari kerja	Terserapnya pencari kerja di pasar kerja	Besaran tenaga kerja yang ditingkatkan mendapat pelatihan berbasis Kompetensi	48,33	36,71	27,66	21,67	17,81
2.	Mendorong terciptanya kesempatan kerja di sector formal maupun sector informal	Mengurangi pengangguran melalui penempatan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	2,83	2,83	3	3	3
3.	Meningkatkan suasana kondusif dalam berinvestasi, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga kerja	Tercapainya perlindungan dan kesejahteraan serta terpenuhinya hak tenaga kerja	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	62,15	64,32	66,5	68,67	70,85
			▪ Jumlah pekerja/Buruh yang menjadi peserta program BPJS Aktif	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
			▪ Besaran Pemeriksaan Perusahaan	22,41	33,84	2.240	2.500	2.880
			▪ Besaran perusahaan dan tenaga kerja yang mendapat pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja	1,74	2,35	2,96	3,56	3,56
4.	Mendorong pengembangan wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru dikawasan transmigrasi	Terciptanya kemandirian kawasan transmigrasi untuk menunjang ketahanan pangan dan pembangunan daerah	Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun dan difasilitasi pelayanan sosial budaya	2	3	3	4	6
5.	Meningkatkan kualitas masyarakat dan permukiman dikawasan transmigrasi	Terwujudnya kemandirian masyarakat dan kawasan transmigrasi	Jumlah masyarakat transmigrasi lokal dan regional yang diberdayakan	0	9	15	15	15

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis supaya efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Tabel 3.2

Strategi	Arah Kebijakan
Terserapnya pencari kerja di pasar kerja;	Meningkatkan kompetensi, Profesionalitas dan produktivitas pencari kerja
Mengurangi pengangguran melalui penempatan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan Kerja yang produktif;	Mendorong terciptanya kesempatan kerja di sektor formal maupun sector informal
Tercapainya kesejahteraan dan terpenuhinya hak tenaga kerja	Mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja dan perbaikan syarat Kerja termasuk upah;
Tercapainya penerapan ketentuan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan di perusahaan;	Melindungi tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja, mendapat perlindungan atas keselamatannya serta meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dan melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja
Terciptanya kemandirian kawasan transmigrasi untuk menunjang ketahanan pangan dan pembangunan daerah;	Pengembangan wilayah harus berbasis pada sektor unggulan dan pengembangan wilayah dilakukan atas dasar karakteristik daerah yang dikembangkan
Terwujudnya kemandirian masyarakat dan kawasan transmigrasi	Meningkatkan SDM masyarakat kawasan transmigrasi, meningkatkan akses transportasi dan komunikasi serta. Meningkatkan sumber daya modal dan investasi;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/kota, dan sumber-sumber pendanaan lainnya)

Table 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Dinas Provinsi				16.111.548.256				16.690.000.000
A.	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>						<i>245.500.000</i>				<i>320.000.000</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Provinsi			Dokumen	75.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Tersedianya Dokumen RKA - SKPD	Dinas Provinsi			Dokumen	3.500.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Tersedianya Dokumen DPA - SKPD	Dinas Provinsi			Dokumen	3.500.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA - SKPD	Tersedianya Dokumen DPA Perubahan SKPD	Dinas Provinsi			Dokumen	3.500.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Provinsi			Laporan	100.000.000	APBD		1 Laporan	125.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Provinsi			Laporan	60.000.000	APBD		1 Laporan	80.000.000
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.244.391.427				11.320.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Provinsi			1 bln 2	10.962.331.427			12 bln	11.000.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	Dinas Provinsi			Dokumen	225.060.000	APBD		1 Dokumen	250.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Provinsi			Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	60.000.000
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Dinas Provinsi			Laporan	7.000.000	APBD		1 Laporan	10.000.000
C.	Administrasi Barang Milik daerah Pada perangkat daerah						159.998.904				195.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Dinas Provinsi			Laporan	75.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000
	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang	Terlaksananya Pembinaan Pengawasan dan	Dinas Provinsi			Laporan	59.998.904	APBD		1 Laporan	65.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	Milik Daerah SKPD	Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD									
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Provinsi			Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan 30.000.000	
D.	Administrasi kepegawaian Perangkat daerah						109.152.000			125.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian	Dinas Provinsi			Dokumen	55.000.000	APBD		1 Dokumen 65.000.000	
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dinas Provinsi			1 Orang 5	54.152.000	APBD		15 Orang 60.000.000	
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						428.708.305			487.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Provinsi			paket	15.000.000	APBD		1 paket 20.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Provinsi			paket	14.525.000	APBD		1 paket 20.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Dinas Provinsi			paket	94.077.255	APBD		1 paket 100.000.000	
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Bahan Penggandaan	Dinas Provinsi			paket	24.175.050	APBD		1 paket 30.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Dinas Provinsi			Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen 7.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Provinsi			1 Laporan 2	22.905.000	APBD		12 Laporan 25.000.000	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Provinsi			2 Laporan 5	199.430.000	APBD		25 Laporan	225.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Provinsi			1 Dokumen	53.596.000	APBD		1 Dokumen	60.000.000
F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						195.280.000				200.000.000
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Dinas Provinsi			1 unit 0	195.280.000	APBD		10 unit	200.000.000
G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						537.793.690				586.500.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Provinsi			1 Laporan	3.500.000	APBD		1 Laporan	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Provinsi			1 Laporan 2	105.000.000	APBD		12 Laporan	125.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Provinsi			1 Laporan	5.000.000	APBD		1 Laporan	6.500.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Provinsi			1 Laporan 2	424.293.690	APBD		12 Laporan	450.000.000
H.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						333.780.130				396.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Dinas Provinsi			1 unit	44.640.000	APBD		1 unit	48.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Provinsi			1 unit	62.140.000	APBD		5 unit	68.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Provinsi			15 unit	13.160.000	APBD		15 unit	15.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Provinsi			1 unit	203.840.130	APBD		1 unit	250.000.000
	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Dinas Provinsi			2 Unit 0	10.000.000	APBD		20 Unit	15.000.000
II.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						155.000.000				190.000.000
A.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)										
	Penyusunan Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Provinsi			1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	125.000.000
	Penyusunan Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	Dinas Provinsi			50 Orang	55.000.000	APBD		50 Orang	65.000.000
III.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						716.317.800				890.000.000
	Pelaksanaan Latihan Berdasarkan Klaster Kompetensi										
	Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Dinas Provinsi			24 Orang	566.317.800	APBD		35 Orang	700.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Berdasarkan Klaster Kompetensi									
	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Latihan Kerja		Dinas Provinsi					APBD			
	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Provinsi			10 LPK	100.000.000	APBD		10 LPK	125.000.000
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		Dinas Provinsi								
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Provinsi			Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	65.000.000
IV.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						305.000.000				370.000.000
	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota										
	Pelayanan Antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Dinas Provinsi			2 orang 5	50.000.000	APBD		25 Orang	60.000.000
	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Provinsi			2 Orang 0	50.000.000	APBD		20 Orang	60.000.000
	Pembinaan Operasional Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Terlaksananya Pembinaan Operasional Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Dinas Provinsi			2 Orang 0	50.000.000	APBD		20 Orang	60.000.000
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Dinas Provinsi								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi pasar Kerja Online	Dinas Provinsi			Orang 500	55.000.000	APBD		500 Orang	65.000.000
	Job Fair / Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair / Bursa Kerja	Dinas Provinsi			1 Orang 0 0	100.000.000	APBD		100 Orang	125.000.000
V.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						325.686.000				360.000.000
	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran perjanjian Kerja Bersama Untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (Satu) Kab/Kota</i>										
	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	Dinas Provinsi			5 Prshn 0	36.286.000	APBD		50 Prshn	40.000.000
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Dinas Provinsi			3 Prshn 0	30.000.000	APBD		30 Prshn	35.000.000
	<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) daerah Provinsi</i>										
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat,	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Dinas Provinsi			2 Perkara 0	50.000.000	APBD		20 Perkara	55.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	berdampak, pada kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	berakibat, berdampak, pada kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi									
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat, berdampak, pada kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat, berdampak, pada kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	Dinas Provinsi			5 Perkara 0	60.002.000	APBD		50 Perkara 65.000.000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Dinas Provinsi			1 Lembaga	27.156.000	APBD		1 Lembaga 30.000.000	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi pengusaha Federasi Konfederasi Serikat Pekerja / Buruh serta Non Afiliasi	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi pengusaha Federasi Konfederasi Serikat Pekerja / Buruh serta Non Afiliasi	Dinas Provinsi			4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20.000.000	APBD		4 Asosiasi dan Serikat Pekerja 25.000.000	
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)		Dinas Provinsi								
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Ditetapkan Upah Minimum Provinsi	Dinas Provinsi			1 SK	59.372.000	APBD		1 Surat Keputusan 65.000.000	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Dinas Provinsi			100 Orang	42.870.000	APBD		100 Orang 45.000.000	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN										700.000.000
	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										
	Pengawasan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan Norma Kerja di Perusahaan	Dinas Provinsi			Perusahaan 2500	177.600.000	APBD		2500 Prshn	200.000.000
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Dinas Provinsi			8 Perusahaan 0	127.340.000	APBD		80 Prshn	150.000.000
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Dinas Provinsi			Perusahaan 2500	350.000.000	APBD		2500 Prshn	350.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI						300.000.000				350.000.000
	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi										
	Advokasi dan Musyawarah Kawasan	Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Kawasan	Dinas Provinsi			'Kawasan	300.000.000	APBD		1 Kwsn Transmigrasi	350.000.000
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						400.000.000				500.000.000
	Penyuluhan Transmigrasi	Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Dinas Provinsi			3 Kpl Keluarga 0	200.000.000	APBD		30 Kpl. Keluarga	250.000.000
	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi	Dinas Provinsi			3 Org 0	200.000.000	APBD		30 Org	250.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	UPTD BALAI KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES KELAS A		Kota Ambon					682.214.563			800.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Kota Ambon					360.791.563	APBD		400.000.000
I.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terselenggaranya pelayanan administrasi									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Ambon			12 Bln		5.098.550	APBD	12 Bln	6.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ambon			12 Bln		6.750.000	APBD	12 Bln	7.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kota Ambon			12 Bln		21.150.500	APBD	12 Bln	25.000.000
	Penyediaan Bahan Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Bahan Cetakan Bahan Pengadaan	Kota Ambon			12 Bln		7.841.500	APBD	12 Bln	8.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kota Ambon			1 Dokumen		2.400.000	APBD	1 Dokumen	2.500.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Ambon			1 Laporan		6.470.000	APBD	1 Laporan	6.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Ambon			4 Laporan		45.227.000	APBD	4 Laporan	50.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
II.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kota Ambon			1 Unit	42.890.300	APBD		1 Unit	45.000.000
III.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Ambon			1 Unit	10.000.000	APBD		1 Unit	15.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Ambon			1 Unit	53.400.000	APBD		1 Unit	55.000.000
IV.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Ambon			1 Laporan	3.600.000	APBD		1 Laporan	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Ambon			1 Laporan	70.000.000	APBD		1 Laporan	80.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ambon			1 Laporan	85.963.713	APBD		1 Laporan	95.000.000
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						321.423.000	APBD			400.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
V.	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Provinsi			2.500 Perusahaan	321.423.000	APBD		2.500 Perusahaan	400.000.000
	UPTD BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL I		Kota Ambon				300.000.000				350.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Kota Ambon				142.794.500	APBD			175.000.000
I.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terselenggaranya pelayanan administrasi	Kota Ambon								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Ambon			12 Bln	502.500			12 Bln	1.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Ambon			12 Bln	20.000.000			12 Bln	25.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kota Ambon			12 Bln	11.089.075			12 Bln	15.000.000
	Penyediaan Bahan Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Bahan Cetakan Bahan Pengadaan	Kota Ambon			12 Bln	1.125.000			12 Bln	1.500.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kota Ambon			1 Dokumen	1.000.000			1 Dokumen	1.500.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Ambon			1 Laporan	1.000.000			1 Laporan	1.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Ambon			4 Laporan	36.280.000			4 Laporan	43.500.000
II.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Ambon								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Ambon			1 Laporan	1.000.000	APBD		1 Laporan	1.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Ambon			1 Laporan	11.440.000	APBD		1 Laporan	15.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ambon			1 Laporan	44.589.708	APBD		1 Laporan	50.000.000
III.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Ambon								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Ambon			10 Unit	10.000.000	APBD		10 Unit	15.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Ambon			1 Unit	4.768.217	APBD		1 Unit	5.000.000
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		Kota Ambon				157.205.500	APBD			175.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
IV.	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Kota Ambon								
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kota Ambon			35 Kasus	30.000.000	APBD		35 Kasus 35.000.000	
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kota Ambon			300 Perusahaan	96.951.400	APBD		300 Perusahaan 100.000.000	
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Kota Ambon			40 Perusahaan	30.254.100	APBD		40 Perusahaan 40.000.000	
	UPTD BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II		Kabupaten Maluku Tengah				280.000.000			350.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						158.000.000	APBD		185.000.000	
I.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terselenggaranya pelayanan administrasi									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Maluku Tengah			12 Bln	1.271.842	APBD		12 Bln 2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Maluku Tengah			12 Bln	7.770.000	APBD		12 Bln 8.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kabupaten Maluku Tengah			12 Bln	8.378.700	APBD		12 Bln 8.500.000	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Bahan Cetak Bahan Pengadaan	Kabupaten Maluku Tengah			12 Bln	2.958.800	APBD		12 Bln	3.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kabupaten Maluku Tengah			1 Dokumen	1.500.000	APBD		1 Dokumen	2.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Maluku Tengah			1 Laporan	3.240.000	APBD		1 Laporan	3.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Maluku Tengah			4 Laporan	32.655.000	APBD		4 Laporan	35.000.000
II.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Kabupaten Maluku Tengah			1 Paket	9.385.950	APBD		1 Paket	10.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya (sewa) Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Maluku Tengah			1 Unit	24.000.000	APBD		1 Unit	30.000.000
III.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Maluku Tengah			1 Laporan	1.000.000	APBD		1 Laporan	1.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Maluku Tengah			1 Laporan	20.650.000	APBD		1 Laporan	25.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Maluku Tengah			1 Laporan	30.249.708	APBD		1 Laporan	35.000.000
IV.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Maluku Tengah			1 Unit	2.840.000	APBD		1 Unit	3.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Maluku Tengah			1 Unit	2.100.000	APBD		1 Unit	3.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Maluku Tengah			5 Unit	10.000.000	APBD		5 Unit	15.000.000
V.	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						122.000.000	APBD			165.000.000
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kabupaten Maluku Tengah			1 Kasus	22.000.000	APBD		1 Kasus	35.000.000
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kabupaten Maluku Tengah			420 Perusahaan	80.000.000	APBD		420 Perusahaan	100.000.000
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Kabupaten Maluku Tengah			50 Perusahaan	20.000.000	APBD		50 Perusahaan	30.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	UPTD BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III		Kabupaten Buru				250.000.000			350.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Kabupaten Buru				140.000.000	APBD		205.000.000	
I.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terselenggaranya pelayanan administrasi									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Buru			12 Bln	1.500.000	APBD	12 Bln	3.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Buru			12 Bln	4.000.000	APBD	12 Bln	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kabupaten Buru			12 Bln	7.000.000	APBD	12 Bln	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Bahan Cetakan Bahan Pengadaan	Kabupaten Buru			12 Bln	1.550.000	APBD	12 Bln	3.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kabupaten Buru			1 Dokumen	1.500.000	APBD	1 Dokumen	3.500.000	
3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Buru			1 Laporan	1.500.000	APBD	1 Laporan	3.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Buru			4 Laporan	25.000.000	APBD	4 Laporan	40.000.000	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
II.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Kabupaten Buru			1 Paket	5.000.000	APBD		1 Paket	10.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya (sewa) Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Buru			1 Unit	24.000.000	APBD		1 Unit	30.000.000
III.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Buru			1 Laporan	1.500.000	APBD		1 Laporan	2.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Buru			1 Laporan	15.000.000	APBD		1 Laporan	20.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Buru			1 Laporan	35.000.000	APBD		1 Laporan	40.000.000
IV.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Buru			1 Unit	2.450.000	APBD		1 Unit	3.500.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Buru			1 Unit	5.000.000	APBD		1 Unit	10.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Buru			5 Unit	10.000.000	APBD		5 Unit	15.000.000
V.	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						110.000.000	APBD			145.000.000
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kabupaten Buru			10 Kasus	20.000.000	APBD		10 Kasus	30.000.000
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kabupaten Buru			100 Perusahaan	50.000.000	APBD		100 Perusahaan	65.000.000
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Kabupaten Buru			60 Perusahaan	40.000.000	APBD		60 Perusahaan	50.000.000
	UPTD BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV		Kabupaten Maluku Tenggara				230.000.000				350.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						135.000.000				185.000.000
I.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terselenggaranya pelayanan administrasi									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Maluku Tenggara			12 Bln	2.000.000	APBD		12 Bln	2.500.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kabupaten Maluku Tenggara			12 Bln	4.700.000	APBD		12 Bln	10.000.000
	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Pengadaan	Kabupaten Maluku Tenggara			12 Bln	1.400.000	APBD		12 Bln	2.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kabupaten Maluku Tenggara			1 Dokumen	1.400.000	APBD		1 Dokumen	2.000.000
3.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Maluku Tenggara			1 Laporan	2.500.000	APBD		1 Laporan	5.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Maluku Tenggara			4 Laporan	43.000.000	APBD		4 Laporan	55.000.000
II.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya (sewa) Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Maluku Tenggara			1 Unit	24.000.000	APBD		1 Unit	30.000.000
III.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Maluku Tenggara			1 Laporan	1.500.000	APBD		1 Laporan	3.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Maluku Tenggara			1 Laporan	12.000.000	APBD		1 Laporan	15.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Maluku Tenggara			1 Laporan	29.000.000	APBD		1 Laporan	40.000.000
IV.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Maluku Tenggara			1 Unit	2.000.000	APBD		1 Unit	2.500.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Maluku Tenggara			1 Unit	1.500.000	APBD		1 Unit	2.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Maluku Tenggara			5 Unit	10.000.000	APBD		5 Unit	15.000.000
V.	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						95.000.000	APBD			165.000.000
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kabupaten Maluku Tenggara			6 Kasus	10.000.000	APBD		6 Kasus	30.000.000
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kabupaten Maluku Tenggara			200 Perusahaan	55.000.000	APBD		200 Perusahaan	80.000.000
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Kabupaten Maluku Tenggara			46 Perusahaan	30.000.000	APBD		46 Perusahaan	55.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025									
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif								
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan														
	UPTD BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V		Kabupaten Kepulauan Tanimbar							250.000.000									350.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									187.400.000	APBD								230.000.000
I.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terselenggaranya pelayanan administrasi																	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			12 Bln	1.700.000	APBD		12 Bln				12 Bln					2.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			12 Bln	5.800.000	APBD		12 Bln				12 Bln					8.000.000
	Penyediaan Bahan Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Bahan Cetakan Bahan Pengadaan	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			12 Bln	3.000.000	APBD		12 Bln				12 Bln					4.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			1 Dokumen	1.500.000	APBD		1 Dokumen				1 Dokumen					2.500.000
3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			1 Laporan	2.300.000	APBD		1 Laporan				1 Laporan					3.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			4 Laporan	58.000.000	APBD		4 Laporan				4 Laporan					60.000.000
II.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			1 Paket	17.500.000	APBD		1 Paket	20.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya (sewa) Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			1 Unit	40.000.000	APBD		1 Unit	50.000.000
III.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			1 Laporan	1.200.000	APBD		1 Laporan	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			1 Laporan	11.900.000	APBD		1 Laporan	20.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			1 Laporan	32.000.000	APBD		1 Laporan	38.000.000
IV.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			1 Unit	1.000.000	APBD		1 Unit	2.500.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			1 Unit	1.500.000	APBD		1 Unit	2.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			1 Unit	10.000.000	APBD		1 Unit	15.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	Lapangan	Lapangan									
V.	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						62.600.000	APBD		120.000.000	
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			1 Kasus	13.000.000	APBD		1 Kasus 30.000.000	
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			325 Perusahaan	35.000.000	APBD		325 Perusahaan 55.000.000	
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Kabupaten Kepulauan Tanimbar			10 Perusahaan	14.600.000	APBD		10 Perusahaan 35.000.000	

BAB V

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku selama periode tahun 2024.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tahun 2024 merupakan penjabaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku 2019-2024 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku ini, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung jawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Maluku.

Ambon, Maret 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Maluku



Endang Diponegoro, SP., MM
NIP. 19630929 198902 1 003